



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DADI UTOMO**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
3. NHK : **840654**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 375.000.000

1. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 110.000.000
2. Tanah Seluas 1.472 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 265.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 92.500.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA AT11I21B01 A/T / SPM/SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, YAMAHA ALL NEW NMAX 155/TAHUN 2021 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. MOTOR, HONDA L1F02N37L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 159.705

F. HARTA LAINNYA Rp. 84.050.000

Sub Total Rp. 560.309.705

III. HUTANG Rp. 99.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 461.309.705



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.